



Analisis risiko penyaluran bansos terhadap penerapan *good corporate governance* pada dinas sosial Kabupaten Rote Ndao

Onimus Ledoh^{1*}, Farida M. Ledoh², Jizrel E. S Ledoh³, ML. Deny Tewu⁴

^{1,2,4} Universitas Kristen Indonesia

³ Universitas Bakrie

¹onimusledoh79@gmail.com, ²faridameriyatiledoh@mail.com, ³jizrelesledoh@gmail.com, ⁴Deny.tewu@uki.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 15 Mei 2022

Disetujui 7 Juni 2022

Diterbitkan 15 Juni 2022

Kata kunci:

Risiko penyaluran bansos;
Good corporate governance; Dinas sosial;
Covid-19; Budaya manajemen risiko

Keywords :

Risk of social assistance distribution; Good corporate governance; Social service; Covid-19; Risk management culture

ABSTRAK

Tata kelola penyaluran bansos kepada masyarakat bisa menimbulkan konflik sosial apabila terjadi ketimpangan. Namun menimbulkan banyak persoalan yang terjadi di daerah khususnya dinas sosial sebagai sektor yang menangani perbaikan data. Permasalahan tatakelola bansos mencakup data bansos, jenis bansos dan penyalur bansos. Penelitian dengan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Jenis partisipatif dan *explanatory* dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi survey dan wawancara, serta studi dokumen. Peneliti secara partisipatif menghimpun data dan informasi dari sebelum tahun 2019 hingga awal April 2022 karena peneliti adalah bagian dari Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao. Teknik analisis bowtie digunakan untuk mengidentifikasi risiko tatakelola penyaluran bansos. Hasil penelitian diperoleh 11 kejadian yang tidak dikehendaki. Dengan KTD ini maka dihubungkan dengan penerapan prinsip TARIF GCG dilakukan pengukuran dan penilaian risiko dengan heat map diperoleh nilai risiko dari level 10 sampai 20. Kemudian dilakukan mitigasi peluang dan dampak, sehingga menurunkan tingkat risiko ke level 6 sampai 12. Masing masing KTD memiliki dampak yang negatif terhadap penyaluran bansos dan secara spesifik sangat mempengaruhi GCG. Untuk meningkatkan budaya manajemen risiko penyaluran bansos, maka mitigasi yang telah dilakukan dengan penerapan prinsip TARIF GCG perlu ditingkatkan lagi menjadi budaya organisasi.

ABSTRACT

The governance of the distribution of social assistance to the community can lead to social conflict if there is an imbalance. However, this creates many problems that occur in the regions, especially the social service as a sector that handles data improvement. Social assistance governance issues include social assistance data, types of social assistance and social assistance distributors. Research with qualitative methods with case study design. This type of research is participatory and explanatory with data collection techniques, namely survey observations and interviews, as well as document studies. The researcher participatively collected data and information from before 2019 to early April 2022 because the researcher was part of the Social Service of Rote Ndao Regency. Bowtie's analysis technique is used to identify the governance risks of social assistance distribution. The results obtained 11 unwanted events. With this KTD, related to the application of the GCG Tariff principle, measurement and risk assessment is carried out using a heat map, the risk value is obtained from level 10 to 20. Then, opportunity and impact mitigation is carried out so as to reduce the risk level to level 6 to 12. Each KTD has a different impact. different. had a negative impact on the distribution of social assistance and in particular greatly affected GCG. To improve the risk management culture for the distribution of social assistance, the mitigation that has been carried out so far by applying the GCG Tariff principle needs to be further enhanced into an organizational culture.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pada masa pra pandemi Covid-19 pemerintah telah menyalurkan beberapa jenis bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Indonesia. Bansos-bansos tersebut antara lain bansos pangan dan bansos program keluarga harapan (PKH). Bansos pangan awalnya dikenal dengan sebutan beras miskin (raskin) sebelum tahun 2017, yang kemudian diubah menjadi beras sejahtera (rastra) tahun 2018 dan pada bulan september 2019 bansos rastra ditransformasi menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT) kemudian tahun 2020 diubah namanya menjadi BPNT/sembako (Kurniawan, 2020). Bansos ini bertujuan untuk menangani tambahan kebutuhan pangan bagi keluarga miskin dan tidak mampu. Dan pemerintah juga menyalurkan bansos PKH sejak tahun 2007 secara nasional dan di Kabupaten Rote Ndao baru dilaksanakan tahun 2013. Bansos PKH ditujukan bagi keluarga miskin yang memenuhi

syarat dengan memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial atau dikategorikan jenis bansos ini adalah bansos bersyarat (Sukoco et al., 2020). Selain itu pemerintah juga memberikan bansos jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau dikenal dengan sebutan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) melalui kartu indonesia sehat (KIS) sejak tahun 2015 yang bersumber dari APBN. Dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang bersumber dari APBD yang diatur secara terpisah oleh pemerintah daerah bagi masyarakat tidak mampu yang tidak menerima dari APBN dengan tujuan untuk menangani jaminan kesehatan bagi masyarakat. Penyaluran bansos kepada masyarakat miskin sesuai amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dan UU 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dengan rujukan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh kementerian sosial.

Saat masa pandemi Covid-19 melanda belahan dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya, pemerintah menambah kebijakan bansos dengan bantuan sosial tunai (BST) yang ditujukan bagi keluarga yang terdampak Covid-19. BST merujuk pada DTKS bagi keluarga yang belum mendapat bantuan sama sekali dan juga data usulan pemerintah daerah berdasarkan permintaan kemensos (surat sekjen kemensos nomor 941/1/DI.01/4/2020 tgl 9 april 2020 perihal data BST dampak Covid-19 dan surat dirjen PFM nomor 1638/6/DI.01/4/2020 tgl 17 april 2020 perihal alokasi penerima BST). Data usulan pemda diperoleh dari usulan desa/kelurahan dan diinput oleh dinsos melalui aplikasi Sisitem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS NG). Aplikasi SIKS NG adalah satu-satunya aplikasi milik kementerian sosial yang telah dirilis sejak tahun 2017 untuk menangani verifikasi dan validasi DTKS. Dimana dengan aplikasi SIKS NG tahun 2019 kemensos mendapatkan penghargaan ISO 270001:2013 untuk kategori manajemen keamanan informasi dan juga mendapat penghargaan TOP 99 inovasi pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi untuk program SIKS NG terkait dengan usaha pengentasan kemiskinan. User pengguna aplikasi ini berada pada dinas sosial kabupaten/kota seluruh Indonesia. Penyaluran bansos pandemi Covid-19 mempedomani Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020, tertanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat sebagai upaya mengatasi dampak pandemik global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di samping itu pula pemerintah menyalurkan bansos bantuan presiden untuk usaha mikro (BPUM), subsidi listrik, prakerja, jaring pengaman sosial (JPS) dari pemerintah provinsi, BLT APBD II dan BLT-DD ditingkat desa/kelurahan, dll. Semua jenis bansos ini merupakan kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah pandemi covid-19 serta pemulihan perekonomian nasional (Noerkaisar, 2021).

Menurut Lestari J. Barani et al (2020) para peneliti dari departemen ekonomi CSIS Indonesia dalam tulisan yang berjudul "*Bantuan sosial ekonomi ditengah pandemi Covid-19 : sudahkah menjangkau sesuai sasaran?*" mengemukakan bahwa bansos penanganan Covid-19 tidak berfokus pada satu program. Dan mengilustrasikan garis besar pemetaan tambahan jaring pegaman sosial yang mencakup PKH, kartu prakerja, kartu sembako, subsidi listrik, dan subsidi insentif perumahan murah. Dengan demikian maka pemerintah dalam hal ini akan menjalankan program JPS secara efektif dan efisien? diakhir tulisan mereka menyampaikan lima catatan dan rekomendasi (Indra et al., 2021). Yang dianggap relevan dengan penelitian ini yakni diperlukan komunikasi yang jelas dan reguler agar masyarakat paham mengenai bantuan yang akan diberikan serta mekanismenya dan pelaksanaan program bansos berada dibawah kemensos, kemenko perekonomian, kemenko PMK, kementerian PUPR, hingga pemerintah daerah maka sinergi antar K/L diperlukan. Yang walaupun anggaran dan bantuan sosial sudah dialokasikan tapi kunci kesuksesan program ini berada pada komunikasi, kerja sama dan koordinasi *multi-stakeholder* (Rahmansyah et al., 2020).

Namun tak dapat dipungkiri bahwa ketimpangan dalam proses penyaluran bansos kepada masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial. Karena selain faktor determinasi ekonomi sebagai penyebab konflik bisa juga disebabkan oleh faktor lain misalkan kekuasaan dan prestise. Dimana konflik bisa saja terjadi di masyarakat tidak hanya di lihat dari sesuatu yang destruktif saja tetapi juga berfungsi sebagai konstruktif seperti halnya dalam kebijakan penyaluran bansos kepada masyarakat saat ini. Artikel yang ditulis Muhamad Zuldin (2019) dengan judul "*ketimpangan sebagai penyebab konflik: kajian atas teori sosial kontemporer*", dimana dilakukan kajian pustaka hubungan antara ketimpangan dengan konflik sosial di masyarakat. Hasil kajiannya menemukan bahwa ada 4 aliran pemikiran dalam teori konflik kontemporer yang mengkaji hubungan ketimpangan dengan konflik yakni aliran pemikiran positif (teori konflik struktural), aliran pemikiran humanisme (interaksi simbolik

dan teori konstruksi sosial), mazhab pemikiran (Jurgen Habermas dan Pierre Bourdieu) dan mazhab multi disiplin ilmu (oleh Johan Galtung dan Anthony Giddens). Teori ini dikembangkan dari teori konflik klasik, khususnya pemikiran Marx yang berpendapat ekonomi adalah satu-satunya faktor konflik dalam masyarakat. Konflik sosial bisa ditimbulkan akibat data yang salah sehingga terjadi ketimpangan dalam tata kelola penyaluran bansos (Rahmansyah et al., 2020).

Penyaluran bansos reguler maupun bansos Covid-19 sebagian besar bersumber dari APBN yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pelaksanaanya verifikasi dan validasi data dilakukan oleh pemerintah daerah secara periodik dan pengesahannya oleh kepala daerah yang kemudian disampaikan kepada menteri sosial melalui gubernur (Firdaus & Shaliha, 2021). Peran dinas sosial dalam melakukan verval (Permensos 5 tahun 2019 tentang pengelolaan DTKS). Dalam pasal pasal 10 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang berbunyi “data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi dan informasi dan dijadikan sebagai data terpadu”. Dengan demikian maka dinas sosial kabupaten yang bertanggungjawab terhadap data terpadu yang dijadikan sebagai rujukan pemerintah dalam menyalurkan bansos. Hubungan antara kebijakan bansos dari pemerintah pusat dan proses verval data oleh pemda tentunya dapat menimbulkan permasalahan terutama di masa wabah pandemi Covid-19. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengungkapan permasalahan dalam kebijakan penyaluran bansos dari kemensos dengan sistim data yang ada terhadap penerapan GCG. Penelitian ini mengemukakan keadaan tak diinginkan (KTD) dalam penyaluran bansos dengan ketidakpastian/*uncertainty* karena strategi kebijakan bansos. Dengan demikian maka peneliti melakukan penelitian terkait dengan “*analisis risiko penyaluran bansos terhadap penerapan good corporate governance (studi kasus pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao)*”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi kasus. Jenis penelitian *explanatory* yang berusaha menjelaskan terjadinya suatu peristiwa, memberi gambaran persoalan, mencari sebab dan alasan terjadinya suatu hal menurut Neuman (2014). Dan teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipatif, survey dan wawancara, serta studi dokumen (Anufia & Alhamid, 2019; Kete, 2017; Rukajat, 2018). Penelitian ini dilakukan secara partisipatif karena peneliti adalah bagian dari Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao dengan menghimpun data dan informasi dari sebelum tahun 2019 hingga awal April 2022. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

1. Teknik analisis bowtie untuk menemukan deskripsi komprehensif tentang identifikasi risiko penyaluran bansos terkait tugas dan wewenang *stakeholders* (*hazard, top event, cause and consequence*)
2. Perhitungan risiko dengan rumus : $R = P \times D$, R = Bobot Risiko, P = Peluang Risiko, ditentukan berdasarkan frekuensi kejadian menggunakan skala Likert 1 - 5 (Sangat jarang - Sangat sering). D = Dampak Risiko, ditentukan berdasarkan estimasi, menggunakan skala Likert 1 - 5 (Sangat kecil - Sangat besar) sehingga diperoleh Tabel Heat Map sebagai berikut :

		Probability				
		1 Sangat jarang	2 Jarang	3 Sedang	4 Sering	5 Sangat sering
Impact	5 Sangat besar	5	10	15	20	25
	4 Besar	4	8	12	16	20
	3 Sedang	3	6	9	12	15
	2 Kecil	2	4	6	8	10
	1 Sangat kecil	1	2	3	4	5

Gambar 1 Heat map

3. Mitigasi risiko

Proses mitigasi risiko dengan prinsip TARIF GCG

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi KTD dengan bow tie analysis

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka dilakukan identifikasi KTD penyaluran bansos pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao dengan diagram BTA diperoleh bahaya/*Hazard* yakni risiko penyaluran bansos terhadap penerapan GCG, dan ditemukan 11 peristiwa puncak/*top event* (dijelaskan pada proses mitigasi dibawah ini). Sedangkan penyebab/*cause* dan dampak/*consequence*, *control* mitigasi peluang dan *control* mitigasi *recovery* untuk meminimalkan peluang dan dampak tergambar pada diagram BTA (terlampir).

Pengukuran dan mitigasi risiko dengan prinsip TARIF dari GCG

Berdasarkan hasil indentifikasi KTD diatas dengan BTA maka dilakukan pengukuran risiko dengan perhitungan score peluang dikali score dampak maka didapatkan hasil penilaian risiko dan selanjutnya dilakukan pemetaan dan mitigasi risiko dengan prinsip TARIF GCG yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan kemensos terkait penyaluran bansos berubah-ubah

Kejadian yang tidak dihehendaki (Transparency)		Score	Status
Kebijakan kemensos terkait penyalur yang menyalurkan bansos sering berubah-ubah			
Penyebab • Pergantian pihak penyalur bansos terutama BPNT/sembako (skema non tunai, butab dan KKS, e-warong)			
Peluang Sistim penyaluran sering berubah-ubah (Score = 4, sering)	Dampak • Koordinasi dan pengawasan bansos didaerah kadang terkendala • Dinas sosial selalu mendapat <i>complaints</i> dari <i>stakeholders</i> dan masyarakat (Score = 4, besar)	16	Peluang Sistim penyaluran sering berubah-ubah (Score = 4, sering)
Mitigasi Peluang Dinas sosial dan <i>stakeholders</i> daerah menyesuaikan pengawasan bansos dengan kebijakan kemensos (Score = 3, sedang)	Mitigasi Dampak • Dimaksimalkan koordinasi dengan pihak penyalur dan pengawasan penyaluran • Dinas sosial tingkatkan sosialisasi dengan pendamping PKH dan TKSK (Score = 3, sedang)	9	Mitigasi Peluang Dinas sosial dan <i>stakeholders</i> daerah menyesuaikan pengawasan bansos dengan kebijakan kemensos (Score = 3, sedang)

2. Publikasi data bansos didaerah terkendala

Kejadian yang tidak dihehendaki (Transparency)		Score	Status
Publikasi data bansos kepada <i>stakeholders</i> dan masyarakat didaerah terkendala			
Penyebab Data penerima bansos sulit didapatkan oleh dinas sosial (data BPNT/sembako, BST dan PBI JK/KIS)			
Peluang Mulai tahun 2021 jumlah KPM bansos tidak diketahui secara pasti	Dampak • Koordinasi dinas sosial dengan pihak penyalur bansos kadang terkendala	15	Peluang Mulai tahun 2021 jumlah KPM bansos tidak diketahui secara pasti

(Score = 3, sedang)	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi data bansos kepada <i>stakeholders</i> dan masyarakat tidak terlaksana • Dinas sosial selalu mendapat <i>complaints</i> dari <i>stakeholders</i>, penerima bansos dan masyarakat (Score = 5, sangat besar)		(Score = 3, sedang)
Mitigasi Peluang Pengolahan data bansos dari aplikasi SIKS NG <i>online</i> kemensos oleh operator (Score = 3, sedang)	Mitigasi Dampak <ul style="list-style-type: none"> • Dimaksimalkan koordinasi dengan pihak penyalur 1. Dilakukan pencetakan surat keterangan dari aplikasi SIKS NG <i>online</i> kemensos sebagai media sosialisasi untuk menjawab pengaduan (Score = 3, sedang)	9	Mitigasi Peluang Pengolahan data bansos dari aplikasi SIKS NG <i>online</i> kemensos oleh operator (Score = 3, sedang)

3. Publikasi aplikasi cek bansos belum maksimal

Kejadian yang tidak dihehendaki (Transparency) Aplikasi cek bansos yang dirilis kemensos tgl 18 agustus 2021 berbasis andriod belum maksimal dipublikasikan kepada masyarakat		Score	Status
Penyebab Video tutorial penggunaan aplikasi tidak diketahui oleh masyarakat			
Peluang Sejak bulan agustus 2021 beberapa kali di publikasikan (Score = 2, jarang)	Dampak <ul style="list-style-type: none"> • Data bansos tidak terpublikasikan secara transparan kepada masyarakat • Masyarakat yang beralamat di desa/kelurahan yang sama berhak mengajukan user ke kemensos dan berhak melakukan usul-sanggah bansos melalui aplikasi ini tidak terlaksana (Score = 5, sangat besar)	10	Peluang Sejak bulan agustus 2021 beberapa kali di publikasikan (Score = 2, jarang)
Mitigasi Peluang <ul style="list-style-type: none"> • Dinas sosial tingkatkan sosialisasi dan publikasi • Di sampaikan surat pemberitahuan kepada camat, kepala desa/luran untuk disosialisasikan kepada masyarakat (Score = 3, sedang)	Mitigasi Dampak <ol style="list-style-type: none"> 2. Dinas sosial tingkatkan sosialisasi penggunaan aplikasi kepada perangkat desa/kelurahan dan kepada masyarakat yang berkunjung ke dinas sosial 3. Disebarkan video tutorial aplikasi ke berbagai media sosial (Score = 3, sedang)	9	Mitigasi Peluang <ul style="list-style-type: none"> • Dinas sosial tingkatkan sosialisasi dan publikasi • Di sampaikan surat pemberitahuan kepada camat, kepala desa/luran untuk disosialisasikan kepada masyarakat (Score = 3, sedang)

4. Tumpang tindih penerima bansos baik dari pusat maupun daerah

Kejadian yang tidak dikehendaki (Accountability) Pada masa pandemi Covid-19 terjadi tumpang tindih penerima bansos baik dari pusat maupun daerah		Score	Status
Penyebab Penyaluran bansos dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan baik pusat maupun daerah (bansos dari kemensos dobel dengan BLT-DD dan bansos JPS prov)			
Peluang Pada tahun 2020 terjadi beberapa bansos (Score = 4, sering)	Dampak <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga yang sama menerima dobel bansos • Ada keluarga yang tidak mendapat bansos sama sekali (Score = 5, sangat besar)	20	Peluang Pada tahun 2020 terjadi beberapa bansos (Score = 4, sering)
Mitigasi Peluang <ul style="list-style-type: none"> • Disampaikan Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020, tertanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat sebagai upaya mengatasi dampak pandemik global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada kepala desa/lurah • Disampaikan surat pemberitahuan dari bupati ke camat, kepala desa/lurah (Score = 2, jarang)	Mitigasi Dampak <ul style="list-style-type: none"> • Dinas sosial koordinasi dengan OPD Dinas PMD dan camat untuk menyikapi persoalan ini • Dinas sosial meminta perangkat desa/kelurahan melakukan musdes/muskel untuk dilakukan pembatalan/penyetoran BLT-DD • BLT-DD dapat dialihkan kepada keluarga lain yang belum mendapat bantuan 4. Kemensos meminta dinsos melakukan input data BLT-DD ke dalam aplikasi SIKS NG kemensos untuk dilakukan pepadanan data penerima bansos (Score = 4, besar)	8	Mitigasi Peluang <ul style="list-style-type: none"> • Disampaikan Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020, tertanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat sebagai upaya mengatasi dampak pandemik global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada kepala desa/lurah • Disampaikan surat pemberitahuan dari bupati ke camat, kepala desa/lurah (Score = 2, jarang)

5. Pengaduan bansos ganda ke dinas sosial

Kejadian yang tidak dikehendaki (Accountability) <i>Stakeholders</i> daerah, penerima bansos dan masyarakat melakukan <i>complaints</i> ke dinas sosial		Score	Status
Penyebab Dinsos bertanggungjawab terhadap data penerima bansos dari kemensos			
Peluang Sejak tahun 2020 sering terjadi <i>complaints</i> dari masyarakat (Score = 4, sering)	Dampak <ul style="list-style-type: none"> • Data keluarga pecahan DTKS, data keluarga <i>exclusion error</i>/ terdampak covid-19 tidak mendapat bantuan (Score = 5, sangat besar)	20	Peluang Sejak tahun 2020 sering terjadi <i>complaints</i> dari masyarakat (Score = 4, sering)

<p>Mitigasi Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan penegasan kepada kepala desa/lurah agar meningkatkan musdes/muskel dan pengusulan data oleh para operator desa/kelurahan melalui aplikasi SIKS NG (Score = 3, sedang) 	<p>Mitigasi Dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas sosial koordinasi dengan OPD Dinas PMD dan camat untuk menyikapi persoalan ini 5. Keluarga yang belum mendapat bantuan diberikan BLT-DD termasuk keluarga miskin ekstrim (Score = 3, besar) 	<p>9</p>	<p>Mitigasi Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan penegasan kepada kepala desa/lurah agar meningkatkan musdes/muskel dan pengusulan data oleh para operator desa/kelurahan melalui aplikasi SIKS NG (Score = 3, sedang)
--	--	-----------------	--

6. Keluarga mampu (ASN), meninggal dunia dan pindah domisili ditetapkan sebagai penerima bansos

<p>Kejadian yang tidak dihehendaki (Accountability) Ada keluarga mampu (ASN), meninggal dunia tanpa ahli waris dan pindah domisili keluar kabupaten yang ditetapkan kemensos menerima bansos</p>	<p>Score</p>	<p>Status</p>	
<p>Kejadian yang tidak dihehendaki (Accountability) Ada keluarga mampu (ASN), meninggal dunia tanpa ahli waris dan pindah domisili keluar kabupaten yang ditetapkan kemensos menerima bansos</p>			
<p>Peluang Sejak tahun 2020-awal 2022 sering terjadi (Score = 4, sering)</p>	<p>Dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASN menerima bansos • Orang yang meninggal dunia tanpa ahli waris diambil bansosnya oleh keluarga karena menggunakan dokumen KK yang lama, demikian juga dengan yang pindah domisili ke luar kabupaten (Score = 5, sangat besar) 	<p>20</p>	<p>Sering</p>
<p>Mitigasi Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan perbaikan data • Prose finalisasi dan pengesahan perbaikan data tepat waktu • Dilakukan koordinasi dengan camat, kepala desa/lurah dan pihak penyalur agar dilakukan verifikasi kembali saat penyaluran bansos di tingkat desa/kelurahan • Dibuatkan akta kematian • Sosialisasi pemutakhiran data (Score = 3, sedang) 	<p>Mitigasi Dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disampaikan surat mensos nomor 717/1/BS/2/2022, tgl 10 februari 2022, tetntang Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yang Diterima Oleh ASN beserta tata cara pembuatan akun SIMPONI dan pembuatan kode billing untuk pengembalian bansos yang diterima ASN • Dilakukan koordinasi dengan pihak penyalur agar sebelum dilakukan pembayaran, diverifkasi dokumen penerima dengan menggunakan KK asli dan terbaru (TTD pejabat berbarcode) (Score = 4, besar) 	<p>12</p>	<p>Sedang</p>

7. Minimnya anggaran verval DTKS

Kejadian yang tidak dikehendaki (Accountability)		Score	Status
Kurang tersedianya anggaran dalam melakukan verifikasi dan validasi DTKS			
Penyebab <ul style="list-style-type: none"> • APBD yang dialokasikan pada OPD dinsos minim Tidak tersedia anggaran di desa/kelurahan untuk para operator aplikasi SIKS NG kemensos			
Peluang Setahun sekali dilakukan kegiatan verval (Score = 3, sedang)	Dampak <ul style="list-style-type: none"> • Kurang dilakukan verval DTKS dan perbaikan DTKS/bansos melalui aplikasi ditingkat desa/kelurahan (Score = 5, sangat besar)	15	Sedang
Mitigasi Peluang <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan koordinasi dengan OPD terkait • Dilakukan koordinasi dengan kades/lurah agar disiapkan anggaran dari APDes (Score = 2, jarang)	Mitigasi Dampak <ul style="list-style-type: none"> • Ditingkatkan pemahaman kepada perangkat desa/kelurahan tentang manfaat verval dan perbaikan DTKS (Score = 4, besar)	8	Jarang

8. Adanya ketimpangan penyaluran bansos reguler kemensos karena DTKS invalid

Kejadian yang tidak dikehendaki (Responsibility)		Score	Status
Sebelum wabah pandemi adanya ketimpangan dalam penyaluran bansos reguler kemensos karena DTKS invalid (<i>inclusion error and exclusion error</i>)			
Penyebab <ul style="list-style-type: none"> • Pemda belum verval DTKS secara optimal • Kurangnya anggaran daerah Alokasi bansos dari kemensos menggunakan kuota			
Peluang Setiap tahun masyarakat diberikan bansos (Score = 4, sering)	Dampak <ul style="list-style-type: none"> • Data <i>inclusion error</i> mendapat bansos tetapi data <i>exclusion error</i> tidak mendapat bansos (potret data terlampir) • Masih ada DTKS yang tidak mendapat bansos reguler kemensos (Score = 5, sangat besar)	20	Peluang Setiap tahun masyarakat diberikan bansos (Score = 4, sering)
Mitigasi Peluang <ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran verval DTKS • Tingkatkan sosialisasi verval DTKS • Pelatihan operator aplikasi SIKS NG • Dilakukan koordinasi dan pemenuhan kuota 	Mitigasi Dampak <ul style="list-style-type: none"> • Ditingkatkan kegiatan verval dan perbaikan DTKS • Data <i>inclusion error</i> disulkan penghapusan dan • data <i>exclusion error</i> diusulkan baru melalui musdes/muskel dengan mempedomani rujukan aturan dan dientry melalui aplikasi SIKS NG 	12	Mitigasi Peluang <ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran verval DTKS • Tingkatkan sosialisasi verval DTKS • Pelatihan operator aplikasi SIKS NG • Dilakukan koordinasi dan pemenuhan kuota

(Score = 3, sedang)	6. pada akhir tahun 2021 dirilis aplikasi CEK BANSOS berbasis android oleh kemensos (Score = 4, besar)		(Score = 3, sedang)
---------------------	---	--	---------------------

9. Penggunaan DTKS dalam penanganan kemiskinan daerah belum maksimal

Kejadian yang tidak dikehendaki (Responsibility) Penggunaan DTKS dalam penanganan kemiskinan daerah belum maksimal		Score	Status
Penyebab <ul style="list-style-type: none"> • Belum semua OPD mengetahui tentang DTKS Bapelitbangda sebagai <i>leading sector</i> pengelolaan dan pemanfaatan DTKS di daerah bersama dinsos tidak melakukan sosialisasi			
Peluang Setiap tahun jarang dilakukan koordinasi (Score = 2, jarang)	Dampak <ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran bansos daerah masih menggunakan data masing-masing OPD • Bansos daerah dan pemda tumpang tindih (Score = 5, sangat besar)	10	Peluang Setiap tahun jarang dilakukan koordinasi (Score = 2, jarang)
Mitigasi Peluang <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan koordinasi lintas OPD • Bapelitbangda menyurati OPD (Score = 2, Jarang)	Mitigasi Dampak <ul style="list-style-type: none"> • Bapelitbang menyurati OPD terkait penggunaan DTKS dalam penanganan kemiskinan daerah 7. Sebagian OPD telah menggunakan DTKS sebagai rujukan kegiatan (Score = 3, sedang)	6	Mitigasi Peluang <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan koordinasi lintas OPD • Bapelitbangda menyurati OPD (Score = 2, Jarang)

10. DTKS/bansos usulan baru (*exclusion error*) belum sesuai prosedur

Kejadian yang tidak dikehendaki (Independency) DTKS/bansos usulan baru (<i>exclusion error</i>) tidak melalui musdes/muskel dan belum menerapkan 14 (empat belas) kriteria kemiskinan (<i>conflic interest</i>)		Score	Status
Penyebab <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman perangkat desa/kelurahan tentang prosedur pengusulan DTKS/bansos • Data yang diusulkan belum memenuhi validitas NIK sesuai data dukcapil Proses pengusulan data sebelumnya berbasis rumah tangga sekarang dirancang kemensos berbasis data isian individu			
Peluang Sejak tahun 2021 kegiatan ini dilakukan oleh operator (Score = 3, sedang)	Dampak <ul style="list-style-type: none"> • Belum semua desa/kelurahan melakukan pengusulan data • Saat penginputan data usulan kedalam aplikasi masih terdapat data <i>error</i> • Data input tidak bisa dibedakan yang mampu dan tidak mampu 	15	Peluang Sejak tahun 2021 kegiatan ini dilakukan oleh operator

<ul style="list-style-type: none"> • Pengangkatan operator baru • Operator kabupaten telah membuat user <i>online</i> aplikasi SIKS NG bagi para operator desa/kel (Score = 3, sedang) 	(Score = 2, jarang)		
--	---------------------	--	--

Berdasarkan mitigasi dengan tarif diatas, maka hasil heat map seperti dijelaskan dalam gambar 2

		Probability				
		1 Sangat jarang	2 Jarang	3 Sedang	4 Sering	5 Sangat sering
Impact	5 Sangat besar	5	3,9 10	2,7,10 15	4,5,6,8,11 20	25
	4 Besars	4	4,7 8	12	16	1
	3 Sedang	3	6	3,9,10,11 9	12	15
	2 Kecil	2	4	1,2,3,5 6	3,6,8 8	10
	1 Sangat kecil	1	2	3	4	5

Gambar 2 Heat map mitigasi risiko

Dari heat map gambar 2 dapat dijelaskan bahwa :

1. KTD 1 “Kebijakan kemensos terkait penyalur yang menyalurkan bansos sering berubah-ubah” dilakukan kontrol mitigasi penyebab dan kontrol mitigasi *recovery* dampak dapat menurunkan nilai risiko dari score 16 menjadi score 9;
2. KTD 2 “Publikasi data bansos kepada stakeholders dan masyarakat didaerah terkendala” dilakukan kontrol mitigasi penyebab dan kontrol mitigasi *recovery* dampak dapat menurunkan nilai risiko dari score 15 menjadi score 9;
3. KTD 3 “Aplikasi cek bansos yang dirilis kemensos tgl 18 agustus 2021 berbasis andriod belum maksimal dipublikasikan kepada masyarakat” dilakukan kontrol mitigasi penyebab dan kontrol mitigasi *recovery* dampak dapat menurunkan nilai risiko dari score 10 menjadi score 9;
4. KTD 4 “Pada masa pandemi Covid-19 terjadi tumpang tindih penerima bansos baik dari pusat maupun daerah” dilakukan kontrol mitigasi penyebab dan kontrol mitigasi *recovery* dampak dapat menurunkan nilai risiko dari score 20 menjadi score 8;
5. KTD 5 “Stakeholders daerah, penerima bansos dan masyarakat melakukan complaints ke dinas sosial” dilakukan kontrol mitigasi penyebab dan kontrol mitigasi *recovery* dampak dapat menurunkan nilai risiko dari score 20 menjadi score 9;
6. KTD 6 “Ada keluarga mampu (ASN), meninggal dunia tanpa ahli waris dan pindah domisili keluar kabupaten yang ditetapkan kemensos menerima bansos” dilakukan kontrol mitigasi penyebab dan kontrol mitigasi *recovery* dampak dapat menurunkan nilai risiko dari score 20 menjadi score 12;
7. KTD 7 “Kurang tersedianya anggaran dalam melakukan verifikasi dan validasi DTKS” dilakukan kontrol mitigasi penyebab dan kontrol mitigasi *recovery* dampak dapat menurunkan nilai risiko dari score 15 menjadi score 8;
8. KTD 8 “Sebelum wabah pandemi adanya ketimpangan dalam penyaluran bansos reguler kemensos karena DTKS invalid (inclusion error and exclusion error)” dilakukan kontrol mitigasi penyebab dan kontrol mitigasi *recovery* dampak dapat menurunkan nilai risiko dari score 20 menjadi score 12;

9. KTD 9 “*Penggunaan DTKS dalam penanganan kemiskinan daerah belum maksimal*” dilakukan kontrol mitigasi penyebab dan kontrol mitigasi *recovery* dampak dapat menurunkan nilai risiko dari score 10 menjadi score 6;
10. KTD 10 “*DTKS/bansos usulan baru (exclusion error) tidak melalui musdes/muskel dan belum menerapkan 14 (empat belas) kriteria kemiskinan (conflic interest)*” dilakukan kontrol mitigasi penyebab dan kontrol mitigasi *recovery* dampak dapat menurunkan nilai risiko dari score 15 menjadi score 6; dan
11. KTD 11 “*DTKS invalid (inclusion error) belum efektif diperbaiki oleh operator desa/kelurahan melalui aplikasi SIKS NG kemensos*” dilakukan kontrol mitigasi penyebab dan kontrol mitigasi *recovery* dampak dapat menurunkan nilai risiko dari score 20 menjadi score 6.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut dengan analisis bowtie maka didapatkan gambaran dan identifikasi risiko penyaluran bansos yang berkaitan dengan *hazard, top event, cause and consequence* maka diperoleh 11 kejadian yang tidak dikehendaki (KTD); Dari KTD ini maka dihubungkan dengan penerapan prinsip TARIF GCG dapat dilakukan pengukuran/penilaian risiko penyaluran bansos diperoleh nilai risiko dari level 10 sampai 20; Masing masing KTD memiliki dampak yang negatif terhadap penyaluran bansos dan secara spesifik sangat mempengaruhi GCG; Dari 11 KTD telah dilakukan mitigasi peluang dan dampak, sehingga menurunkan tingkat risiko ke level 6 sampai 12; Untuk meningkatkan budaya manajemen risiko penyaluran bansos, maka mitigasi yang telah dilakukan dengan penerapan GCG perlu ditingkatkan lagi menjadi budaya organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen pengumpulan data*. INA-Rxiv.
- Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). Bantuan sosial ekonomi di tengah pandemi COVID-19: Sudahkah menjaring sesuai sasaran. *CSIS Commentaries*, 1–11.
- Firdaus, A. Y., & Shaliha, S. (2021). Penerapan prinsip good corporate governance (gcg) dalam program kartu jakarta pintar plus (kjp plus) di smk negeri 20 jakarta pada masa pandemi covid-19. *International Journal of Social and Public Administration*, 1(1).
- Indra, I. M., Septivani, C. N., & Kusdani, D. (2021). Gambaran jenis risiko pengelolaan bantuan sosial selama pandemi covid-19 di Indonesia. *Premium Insurance Business Journal*, 8(1), 8–17.
- Kete, S. (2017). Implementasi evaluasi program model formatif mata pelajaran Bahasa Indonesia pada SMP Negeri 4 Kendari Kota Kendari. *AI-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 10(1), 109–126.
- Kurniawan, A. (2020). Analisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Selotong ditinjau dari perspektif ekonomi islam. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024
- Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2020.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. T. S. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.

- Sukoco, G. A., Arsendy, S., & Zulfa, A. H. (2020). *Inklusifkah sistem pendidikan Indonesia? Studi kasus penggunaan bahasa ibu dan perannya terhadap hasil belajar siswa*. 53.
- Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020, tertanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat sebagai upaya mengatasi dampak pandemik global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- W Lawrence, N. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Pearson Education Limited.
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan sebagai penyebab konflik: Kajian atas teori sosial kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157–183.